

LAPORAN KINERJA INTERNAL PEMERINTAH

TA. 2023



Pemerintah
Kabupaten
Jombang



INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

Jln. Gatot Subroto No. 169 Jombang

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Kabupaten Jombang menyusun laporan kinerja yang disampaikan kepada Bupati Jombang.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dengan menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi peran dan fungsi Inspektorat dalam kegiatan pengawasan sehingga mendukung kinerja Inspektorat mewujudkan pengawasan yang berkualitas, efektif dan efisien.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) ini dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Semoga laporan ini bermanfaat untuk bahan evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang sekaligus sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Kabupaten Jombang.

Jombang, 30 Januari 2024
INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG

ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., MSI.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670105 199212 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman	
Kata Pengantar.....	ii	
Daftar Isi	iii	
Ringkasan Eksekutif	iv	
BAB I : PENDAHULUAN		
1.1 Struktur Organisasi	1	
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1	
1.3 Isu Strategis	3	
1.4 Cascading Kinerja (Matrik Peran Hasil)	4	
1.5 Peta Proses Bisnis.....	13	
1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi.....	16	
BAB II : PERENCANAAN KINERJA		
2.1. Rencana Strategis	19	
2.2. Rencana Kerja Tahun 2023	20	
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	20	
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA		
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	22	
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	31	
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir	33	
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Akhir jangka menengah (Renstra).....	35	
3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional.....	36	
3.1.5 Analisis atas realisasi kinerja.....	38	
3.2. Realisasi Anggaran.....	38	
3.2.1. Perbandingan realisasi kinerja dan realisasi anggaran	41	
3.2.2. Efisiensi penggunaan sumber daya	42	
3.3. Upaya Perbaikan Kinerja	46	
BAB IV : PENUTUP		48
Lampiran		

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang merupakan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2023 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2023 yang melibatkan seluruh unsur Inspektorat Kabupaten Jombang. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan rata-rata capaian kinerja 100,65%. Semua pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target terdapat tingkat efisiensi anggaran rata-rata sebesar 3,58% dengan penyerapan anggaran tahun 2023 dari sisi belanja mencapai 96,3%, sedangkan tingkat efisiensi Sumber Daya Manusia sebesar 12,83% dari ketersediaan pegawai sebesar 87,81%.

Namun keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak lepas dari kendala/ hambatan antara lain :

1. Register Risiko dalam mencapai target kinerja OPD belum menjadi perhatian dari OPD.
2. Penilaian Kapabilitas APIP tidak mengalami peningkatan dari tahun 2022
3. Jenis pemeriksaan dan jumlah obyek pemeriksaan yang berupa mandatory dari pemerintah pusat atas kondisi terkini serta MCP KPK menyebabkan banyaknya penugasan di luar PKPT.

Terhadap hambatan/masalah tersebut dilakukan Strategi/upaya pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Aktif melakukan pendampingan kepada auditan (OPD) berupa Sosialisasi Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada seluruh OPD.
2. Membentuk Tim SAKIP dan Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat serta Tim Evaluasi Internal.

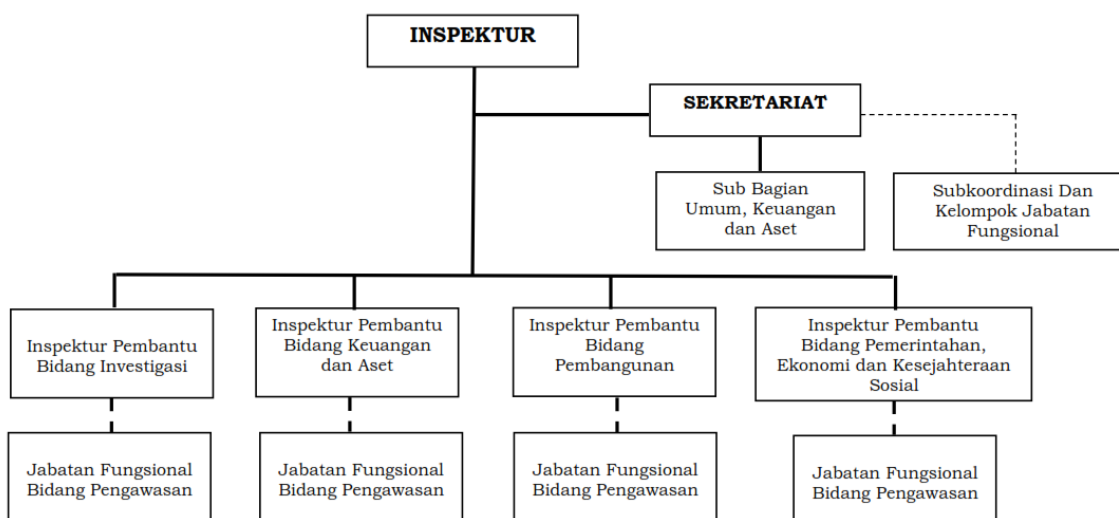
3. Melakukan koordinasi yang baik dan secara terus menerus dengan BPKP dalam upaya meningkatkan Kapabilitas APIP.
4. Dilaksanakannya Perubahan PKPT untuk penyesuaian atas tugas mandatory.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat tiap tribulan dengan menghadirkan seluruh PPTK/Irban dan auditor meliputi dalnis dan ketua tim terkait realisasi kinerja dan anggaran terutama penugasan pengawasan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jombang, maka susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Jombang
sesuai Perbup. 95 Tahun 2021**

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 95 Tahun 2021, Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa;

3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
5. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Jombang didukung dengan sumber daya aparatur sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Jombang yang terdiri :

PNS : 72 orang

Non PNS : 4 (empat) orang

- b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan golongan :

Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan

No	Golongan	A	B	C	D	Jumlah
1	IV	2	6	3	-	11
2	III	-	13	6	14	43
3	II	-	-	17	11	28
4	I	-	-	-	-	0
JUMLAH						72

- c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan pendidikan :

Tabel 1.2 Sumber Daya Aparatur berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	12
2	Sarjana S1/D-IV	32
3	Diploma III	27

No	Pendidikan	Jumlah
4	SMA (Sederajat)	1
5	SMP (Sederajat)	-
6	SD (Sederajat)	-
JUMLAH		72

d. Sumber Daya Aparatur berdasarkan jabatan :

Tabel 1.3 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Jabatan Struktural	7
	Inspektur (Eselon II)	1
	Sekretaris (Eselon III)	1
	Inspektur Pembantu Bidang (Eselon III)	4
	Kasubag (Eselon IV)	1
2.	Jabatan Fungsional	61
	Auditor Ahli Madya	4
	Auditor Ahli Muda	16
	Auditor Ahli Pertama	13
	Auditor Pelaksana	27
	P2UPD	0
	Perencana Ahli Muda	1
3.	Jabatan Fungsional Umum	4

e. Non PNS : 4 (empat) orang

1.3 Isu Strategis

Isu Strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang yang selaras dengan Misi ke-1 Kabupaten Jombang, yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional”. Dengan Tujuan yang diampu Inspektorat yaitu “Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi”.

Isu strategis yang akan ditindaklanjuti Inspektorat Kabupaten Jombang sesuai dalam Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 (Sesuai Kepmen 050-5889), yaitu :

1. Upaya peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Evaluasi Reformasi Birokrasi
2. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko.
3. Pengendalian Internal pada Pemerintah Daerah sehingga Maturitas SPIP

bertahan pada level 3 (terdefinisi).

4. Upaya peningkatan Kapabilitas APIP level 3
5. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) melalui Monitoring Centre For Prevention (MCP) Korsubgah KPK-RI.
6. Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Kabupaten Jombang Menuju WBK/WBBM.
7. Hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB atas SAKIP Pemerintah Kabupaten Jombang belum memperoleh nilai A.
8. Respon pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah belum optimal sehingga perlu dilaksanakan koordinasi yang lebih intens dengan OPD terkait guna terlaksananya TLHP sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan dalam Laporan Hasil Pengawasan.

Dalam rangka menghadapi Isu-isu strategis diatas, Inspektorat perlu melakukan beberapa upaya penanganan melalui beberapa program sebagaimana amanah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah; dan
- c. Program Perumusan Kebijakan Teknis Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi.

Setiap program memiliki indikator sebagai tolak ukur keberhasilan. Dan Setiap program didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaannya.

1.4 Cascading Kinerja (Matrik Peran Hasil)

Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang. Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023, pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jombang terkait dengan pencapaian misi pertama.

Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional”, dengan tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan dan Efektif Serta Penyelenggaraan Layanan Publik Yang Berkualitas”. Indikator tujuan RPJMD dari misi pertama ini adalah “Indeks Good Governance”. Inspektorat Kabupaten Jombang mendukung sasaran RPJMD yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi” dengan indikator sasaran “Indeks Reformasi Birokrasi”.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Adapun Tujuan Inspektorat Kabupaten Jombang adalah ‘Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi’ dengan sasaran strategis ada 2 (dua) yaitu “Meningkatnya Hasil Pengawasan yang berkualitas dan Akuntabel “ dan “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah”.

Cascading Inspektorat yang dapat dijelaskan melalui Matrik Peran Hasil yang dapat dijelaskan melalui matrik berikut ini :

MATRIKS PEMBAGIAN PERAN DAN HASIL

PEGAWAI	JABATAN	OUTCOME ANTARA / OUTPUT / LAYANAN						
ABDUL MADJID NINDYAGUNG	Inspektur Kabupaten Jombang	Kapabilitas APIP	Maturitas SPIP	Persentase unit kerja yang mendapat Nilai SAKIP A	Persentase unit kerja yang mendapat Maturitas SPIP Level 3 (SPIP Terintegrasi)	Persentase Rata-rata capaian kinerja aparatur Inspektorat	Persentase PD yang nilai RBnya meningkat	Nilai Evaluasi AKIP OPD
TUTUK MAHMULAH	Auditor Ahli Madya		Terselenggaranya Reviu Laporan Keuangan (LK SKPD dan SO) Terselenggaranya Evaluasi SAKIP Terselenggaranya Evaluasi Hibah/Bansos/BK Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Terselenggaranya Evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Terselenggaranya Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Terselenggaranya Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terselenggaranya Reviu (LPPD, LKJIP, Tata Kelola Perizinan, Manajemen ASN) Terselenggaranya Audit Kinerja Terselenggaranya Evaluasi Dana BOS Terselenggaranya Reviu Rencana Kerja (Renja) Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terselenggaranya Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran					
ANIK YULIATI	Auditor Ahli Madya		Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (BK-Identifikasi Titik Rawan Gratifikasi) Terselenggaranya Kegiatan Dengan Tujuan Tertentu Terselenggaranya reviu dokumen Laporan Kinerja Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (SPI, MCP, LHKAN) Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (SPIP+RR+MR SPBE) Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Dana BOS Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ZI)	Terselenggaranya evaluasi dan asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SAKIP)
RIRIS ERNAWATI	Auditor Ahli Madya				Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi (BOS) Terselenggaranya Kegiatan Dengan Tujuan Tertentu (APB Desa) Terselenggaranya Kegiatan Reviu laporan Keuangan Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Terselenggaranya Kegiatan Monitoring Terselenggaranya Kegiatan Reviu Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi			

ABD WAHID	Auditor Ahli Madya		Terselenggaranya Reviu DAK Tahap 1 dan Tahap 2 Terselenggaranya Pemeriksaan Probitiy Audit Terselenggaranya Money Penyerapan Anggaran dan Persediaan Kecamatan (OPS) Terselenggaranya Reviu HPS Terselenggaranya Reviu Data Kontrak Terselenggaranya Evaluasi PPRG Terselenggaranya DTT Infrastruktur TA 2023 Terselenggaranya Hibah Bansos/BK Terselenggaranya Kontrak Kritis Terselenggaranya Reviu ASB Kontruksi dan HSPK Terselenggaranya Reviu dokumen Perencanaan dan Penganggaran Terselenggaranya Reviu Laporan Kinerja Terselenggaranya Reviu Renja Terselenggaranya DTT Belanja Kecamatan Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terselenggaranya Evaluasi SAKIP Terselenggaranya Reviu Pelayanan Publik (MCP) Terselenggaranya Stock Opname Terselenggaranya Audit ketaatan					
LILIES WIDIANINGSIH	Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset			Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
ANIS ZUL HULAIFAH	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	
SETIAWAN AFANDI	Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan sesuai aturan Meningkatkan Kualitas Pendampingan dan Asistensi	
MUHAMMAD BAIDOWI	Sekretaris Inspektorat				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan Terlaksananya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah sesuai aturan Terlaksananya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang terusun sesuai dengan aturan Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai aturan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai aturan Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
EKO PRASETYO	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi		Terlaksananya reviu LkjiP Terlaksananya evaluasi BOS SD Terlaksananya Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SAKIP) Terlaksananya Pengawasan Desa	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu	Terlaksananya kerjasama pengawasan internal		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	

Gambar 1.2 Matrik Peran Hasil Eselon III dan JF Ahli Madya Inspektorat Kabupaten Jombang

PEGAWAI	JABATAN	OUTCOME ANTARA / OUTPUT / LAYANAN									
MUHAMMAD BAIDOWI	Sekretaris Inspektorat	Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	Terlaksananya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah sesuai aturan	Terlaksananya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai dengan aturan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai aturan	Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai aturan	Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
NIKETUT MURBAWATI	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset	Terlaksananya administrasi pengelolaan kepegawaian yang tertib, sesuai prosedur, dan ketentuan Terlaksananya APIP yang mengikuti diklat/ workshop/ bintek	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tersusunnya dokumen laporan keuangan perangkat daerah sesuai dengan aturan	Terpenuhinya pengelolaan BMD PD sesuai aturan			Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan yang menunjang kinerja pelayanan Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur gedung kantor yang menunjang kinerja pelayanan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang menunjang kinerja pelayanan		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya pemenuhan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik
SETIA RINI ARIESTA R	PENGELOLA EVALUASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN					Terlaksananya Penghimpunan, Pengadministrasian, Pengelolaan dan Penyimpanan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLHP). Tersusunnya Laporan berkala secara tertib sebagai bahan penyusunan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan berikutnya					
DIAN FITRIANI	PENGELOLA EVALUASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN					Terlaksananya Penghimpunan, Pengadministrasian, Pengelolaan dan Penyimpanan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) APIP Tersusunnya Laporan berkala secara tertib sebagai bahan penyusunan evaluasi tindak lanjut Laporan Hasil pemeriksaan berikutnya					
TRIYA WIJAYANINGRUM	Perencana Ahli Muda				Terselenggaranya dokumen evaluasi perangkat daerah sesuai dengan aturan Terselenggaranya dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai dengan aturan			Terlaksananya penerbitan laporan kegiatan perumusan Kebijakan teknis pengawasan Terlaksananya penerbitan laporan kegiatan perumusan Kebijakan teknis fasilitasi pengawasan			

Gambar 1.3 Matrik Peran Hasil Sekretariat Inspektorat Kabupaten Jombang

PEGAWAI	JABATAN	OUTCOME ANTARA / OUTPUT / LAYANAN		
LILIES WIDIANINGSIH	Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal
REZHA NOVADRIANTO	Auditor Terampil		Terselenggaranya Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi Terselenggaranya Kegiatan Reviu Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Terselenggaranya Kegiatan Monitoring	Terselenggaranya Kegiatan Dengan Tujuan Tertentu (APBDesa)
LINA TRI JAYANTI	Auditor Ahli Pertama		Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi Terselenggaranya Kegiatan Reviu Terselenggaranya Kegiatan Monitoring Terselenggaranya Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya Kegiatan dengan Tujuan Tertentu (APBDesa)
NINA ROSALINA	Auditor Ahli Muda		Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi Terselenggaranya Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Terselenggaranya Kegiatan Reviu Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya Kegiatan Dengan Tujuan Tertentu (APBDesa) Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi (BOS SD)
BUYUNG AJI PAMUNGKAS	Pelaksana/Terampil - Auditor		Terselenggaranya Kegiatan Monitoring Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Terselenggaranya Kegiatan Reviu Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi Terselenggaranya Kegiatan Reviu laporan Keuangan	Terselenggaranya Kegiatan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (APBDesa)
LELITA DWI MEIRANY	Auditor Ahli Pertama		Terselenggaranya Kegiatan Monitoring Terselenggaranya Kegiatan Reviu laporan Keuangan Terselenggaranya Kegiatan Reviu Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi	Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi (BOS) Terselenggaranya Kegiatan Dengan Tujuan Tertentu (APBDesa)
EKO ADI CANDRA	Auditor Ahli Muda		Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi Terselenggaranya Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Terselenggaranya Kegiatan Monitoring Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Terselenggaranya Kegiatan Reviu	Terselenggaranya Kegiatan Dengan Tujuan Tertentu (APBDesa)
YOGA PRATAMA	Auditor Ahli Pertama		Terselenggaranya Kegiatan Reviu Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi Terselenggaranya Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Terselenggaranya Kegiatan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi Terselenggaranya Kegiatan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
DWI PUJI SULISTIYA	Auditor Terampil		Terselenggaranya Kegiatan Reviu Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Terselenggaranya Kegiatan Reviu laporan Keuangan	Terselenggaranya Kegiatan Dengan Tujuan Tertentu (APBDesa) Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi (BOS)
ARI RAHMANSYAH DWI PRASETYO	PELAKSANA/TERAMPIL - AUDITOR		Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Terselenggaranya Kegiatan Reviu laporan Keuangan Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi Terselenggaranya Kegiatan Reviu Terselenggaranya Kegiatan Monitoring	Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi (BOS) Terselenggaranya Kegiatan Dengan Tujuan Tertentu (APBDesa)
ZAYYA ALMAS SALSABILA	AUDITOR PELAKSANA		Terselenggaranya Kegiatan Reviu Terselenggaranya Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Terselenggaranya Kegiatan Monitoring Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi	Terselenggaranya Kegiatan Dengan Tujuan Tertentu (APBDes) Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi (BOS)
ZUAMA BIROHMATIKA	Auditor Terampil		Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Terselenggaranya Kegiatan Reviu Terselenggaranya Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi	Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi BOS Terselenggaranya Kegiatan Dengan Tujuan Tertentu (APBDes)
RISKA INDAH SUCI HARINI	Auditor Ahli Pertama		Terselenggaranya Kegiatan Reviu Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi Terselenggaranya Kegiatan Monitoring Terselenggaranya Kegiatan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Terselenggaranya Kegiatan Audit Terselenggaranya Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Terselenggaranya Kegiatan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (APBDesa)
FITRIYANINGRUM NUR HIDAYAH	Auditor Ahli Pertama		Terselenggaranya Kegiatan Reviu laporan Keuangan Terselenggaranya Kegiatan Monitoring Terselenggaranya Kegiatan Reviu Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi (BOS) Terselenggaranya Kegiatan Dengan Tujuan Tertentu (APBDesa)

Gambar 1.4 Matrik Peran Hasil Bidang Keuangan dan Aset Inspektorat Kabupaten Jombang

PEGAWAI	JABATAN	OUTCOME ANTARA / OUTPUT / LAYANAN			
SETIAWAN AFANDI	Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan sesuai aturan	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal
TAUFIK AKBAR SOLIKIN	Auditor Ahli Muda	Terselenggaranya Kegiatan Reviu Laporan Keuangan (Stock dan Kas Opname) Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (APBDDesa) Terselenggaranya Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran			Terselenggaranya Pemeriksaan Fisik/Belanja Terselenggaranya Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Terselenggaranya Evaluasi SAKIP Terselenggaranya Reviu ASB Konstruksi dan HSPK Terselenggaranya Pemeriksaan Probitiy Audit Terselenggaranya Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
GITA PRATIWI	Auditor Ahli Pertama	Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (APBDDesa) Terselenggaranya Kegiatan Reviu Terselenggaranya Kegiatan Reviu Laporan Keuangan			Terselenggaranya Kegiatan Reviu Terselenggaranya Pemeriksaan Probitiy Audit Terselenggaranya Pemeriksaan Fisik/Belanja Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Terselenggaranya Evaluasi SAKIP
DEVITA ROSALIA	Auditor Ahli Pertama	Terselenggaranya Kegiatan Monitoring Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terselenggaranya Reviu			Terselenggaranya Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Terselenggaranya Pemeriksaan Probitiy Audit Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Terselenggaranya Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
ISA WHISNU YUDISTIRA	Auditor Ahli Muda	Terselenggaranya Kegiatan Reviu Terselenggaranya Kegiatan Audit			Terselenggaranya Kegiatan Monitoring Terselenggaranya Kegiatan Reviu Terselenggaranya Kegiatan Audit Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi
BEBA SHONIA NUR AZHAMI	Auditor Ahli Pertama	Terselenggaranya Reviu Terselenggaranya Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Terselenggaranya Monitoring Terselenggaranya Audit Terselenggaranya Audit			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Terselenggaranya Reviu
MOHAMAD FAIZ	Auditor Terampil	Terselenggaranya Reviu Terselenggaranya Monitoring Terselenggaranya Audit			Terselenggaranya Reviu Terselenggaranya Monitoring Terselenggaranya Audit
AHMAD HASAN BUCHORI	Auditor Ahli Muda	Terselenggaranya Reviu RKA dan RKA-P Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Probitiy Audit Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu APBDDes Terselenggaranya Reviu Stok Opname (SO) Terselenggaranya Evaluasi SAKIP Terselenggaranya Reviu Laporan Kinerja (LKJIP) Terselenggaranya Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Terselenggaranya Reviu Harga Perkiraan Sendiri Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Belanja			Terselenggaranya Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Terselenggaranya Pemeriksaan Audit Ketaatan Terselenggaranya Monitoring Penyerapan Anggaran dan Persediaan Kecamatan Terselenggaranya Evaluasi Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Terselenggaranya Monitoring Kontrak Kritis
DWI ANITA MARETIKA SARI	Auditor Pertama	Terselenggaranya Reviu Laporan Kinerja (LKJIP) Terselenggaranya Reviu Laporan Keuangan Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terselenggaranya Reviu		Terselenggaranya Evaluasi SAKIP	Terselenggaranya Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Terselenggaranya Pemeriksaan Probitiy Audit Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Terselenggaranya Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa
YUNI PRAVITASARI	Auditor Ahli Muda	Terselenggaranya Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Terselenggaranya Reviu Terselenggaranya Kegiatan Monitoring Terselenggaranya Hasil Audit			Terselenggaranya Monitoring Terselenggaranya Audit Terselenggaranya Reviu
RANGGA KUSUMA	Auditor Ahli Muda				Terselenggaranya Reviu Rencana Kerja OPD 2025 Terselenggaranya Pemeriksaan Probitiy Audit dan Ketaatan Terselenggaranya Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terselenggaranya Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Terselenggaranya Reviu Pelayanan Publik Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi PBJ (Kontrak Kritis) Terselenggaranya Pemeriksaan Probitiy Audit Terselenggaranya Audit Ketaatan Terselenggaranya Reviu Dana Alokasi (DAK) Fisik T1 Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terselenggaranya Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Terselenggaranya Reviu Dana Alokasi (DAK) Fisik T2
RISMALA FARABILLA	AUDITOR PELAKSANA	Terselenggaranya Reviu Terselenggaranya Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Terselenggaranya Audit Terselenggaranya Monitoring			Terselenggaranya Monitoring Terselenggaranya Audit Terselenggaranya Reviu

Gambar 1.5 Matrik Peran Hasil Bidang Pembangunan Inspektorat Kabupaten Jombang

PEGAWAI	JABATAN	OUTCOME ANTARA / OUTPUT / LAYANAN			
ANIS ZUL HULAIFAH	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi
ABRAHAM BASWARA PUTRA	Auditor Terampil	Terselenggaranya Evaluasi SAKIP	Terselenggaranya Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Terselenggaranya Audit Kinerja Terselenggaranya Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terselenggaranya Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Terselenggaranya Reviu Laporan Keuangan dan Stock Opname Terselenggaranya Evaluasi Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan Terselenggaranya Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu		
NADIYAH SHOFWAH KUSUMANINGATI	Auditor Terampil	Terselenggaranya Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Terselenggaranya Evaluasi Hibah/Bansos/BK (Bantuan Keuangan) Terselenggaranya Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terselenggaranya Evaluasi SAKIP Terselenggaranya Evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terselenggaranya Audit Kinerja Terselenggaranya Evaluasi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)	Terselenggaranya Reviu Laporan Keuangan dan Stock Opname (LK dan SO) Terselenggaranya Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	
NUR AINI	Auditor Ahli Pertama	Terselenggaranya Evaluasi dan asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SAKIP)	Terselenggaranya Evaluasi Hibah/Bansos/BK Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Terselenggaranya Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terselenggaranya Reviu	Terselenggaranya reviu laporan keuangan (SO) Terselenggaranya Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran	
ASTRID MUTIASARI	Auditor Terampil	Terselenggaranya Evaluasi SAKIP	Terselenggaranya Audit Kinerja Terselenggaranya Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Terselenggaranya Evaluasi Hibah/Bansos/BK (Bantuan Keuangan) Terselenggaranya Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terselenggaranya Evaluasi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Terselenggaranya Evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Terselenggaranya Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Terselenggaranya Reviu Laporan Keuangan dan Stock Opname (LK dan SO)	
IDDA TIS'ATIN MUSY AFA'AH	PELAKSANA/TERAMPIL - AUDITOR		Terselenggaranya Evaluasi Dana BOS Terselenggaranya Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Terselenggaranya Reviu (LPPD, LKJIP) Terselenggaranya Evaluasi Hibah/Bansos/BK Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terselenggaranya Evaluasi SAKIP Terselenggaranya Audit Kinerja	Terselenggaranya Reviu Laporan Keuangan (LK dan SO) Terselenggaranya Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	
KIKY WIDYA MELANIE	Auditor Ahli Muda	Terselenggaranya Evaluasi SAKIP	Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terselenggaranya Reviu (LPPD, LKJIP) Terselenggaranya Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Terselenggaranya Evaluasi Hibah/Bansos/BK Terselenggaranya Evaluasi Dana BOS Terselenggaranya Audit Kinerja Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya reviu laporan keuangan Terselenggaranya Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran	
LANDA TEGAR ISTIGHFARA	PELAKSANA/TERAMPIL - AUDITOR		Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terselenggaranya Reviu (LPPD, LKJIP) Terselenggaranya Evaluasi Hibah/Bansos/BK Terselenggaranya Evaluasi Dana BOS Terselenggaranya Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Terselenggaranya Evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Terselenggaranya Audit Kinerja	Terselenggaranya Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Terselenggaranya Reviu Laporan Keuangan dan Stok Opname	Terselenggaranya Evaluasi SAKIP

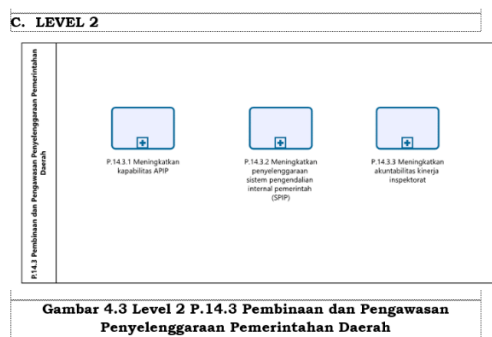
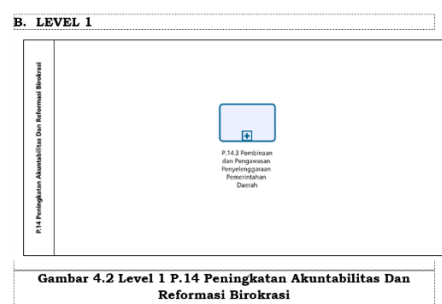
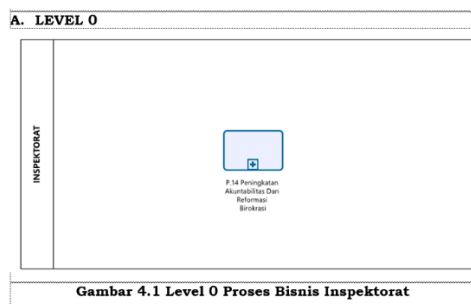
Gambar 1.5 Matrik Peran Hasil Bidang Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Inspektorat Kabupaten Jombang

PEGAWAI	JABATAN	OUTCOME ANTARA / OUTPUT / LAYANAN										
EKO PRASETYO	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi	Terlaksananya reviu LkJP	Terlaksananya evaluasi BOS SD	Terlaksananya Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SAKIP)	Terlaksananya Pengawasan Desa	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya kerjasama pengawasan internal	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
MOHTAR TRI EFENDI	Auditor Terampil	Terselenggaranya Reviu Dokumen LkJP	Terselenggaranya kegiatan Evaluasi BOS SD	Terselenggaranya Evaluasi dan asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SAKIP)	Terselenggaranya Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ZI)		Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (SABER PUNGLI+Identifikasi Titik Rawan Gratifikasi) Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (SABER PUNGLI+Identifikasi Titik Rawan Gratifikasi)	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (LHKAN)		Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (SPIP+RR+MR SPBE) Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (SPIP+RR+MR SPBE) Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (SPIP+RR+MR SPBE)	
JENNY SEPTYA DAMAI NAVIDA	PELAKSANA/TERAMPIL - AUDITOR	Terselenggaranya kegiatan reviu LKJP	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Dana BOS	Terselenggaranya evaluasi dan asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SAKIP)	Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Zona Integritas)		Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Identifikasi Titik Rawan Gratifikasi)	Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (MCP, LHKAN)	Terselenggaranya Kegiatan Dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (SPIP+RR+MR SPBE)	
RINA DWI SEPTANINGSIH	Auditor Ahli Pertama		Terselenggaranya Evaluasi BOS SD	Terselenggaranya Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SAKIP)	Terselenggaranya Pengawasan Desa	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Zona Integritas)		Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Benturan Kepentingan, Identifikasi Titik Rawan Gratifikasi)	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (MCP, LHKAN)	Terselenggaranya Kegiatan Dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (RR+MR SPBE)	
IRMA CHANDRAWENING	Auditor Ahli Pertama	Terselenggaranya Reviu LKJP		Terselenggaranya Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SAKIP)	Terselenggaranya Pengawasan Desa	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Zona Integritas)		Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (SP4N Lapor, Benturan Kepentingan, Identifikasi Titik Rawan Gratifikasi)	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (MCP, LHKAN)	Terselenggaranya Kegiatan Dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (RR+MR SPBE)	
NAVY YUDHISTIRA PRATAMA	PELAKSANA/TERAMPIL - AUDITOR	Terselenggaranya reviu LkJP		Terselenggaranya Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SAKIP)	Terselenggaranya Pengawasan Desa	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ZI)		Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Identifikasi Titik Rawan Gratifikasi)	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (LHKAN)	Terselenggaranya Kegiatan Dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (SPIP+RR+MR SPBE)	
NEON AGUSTIN PARNARIRIN	Auditor Ahli Muda		Terlaksana evaluasi BOS SD	Terselenggaranya Evaluasi dan Asistensi pelaksanaan reformasi birokrasi (sakip)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan tujuan tertentu penyelenggaraan pemerintah desa	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ZI)		Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (BK+Identifikasi Titik Rawan Gratifikasi)	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (LHKAN)	Terselenggaranya Kegiatan Dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (RR+MR SPBE)	
VICA IRLYA YANNY AGUSTINA	PELAKSANA/TERAMPIL - AUDITOR		Terselenggaranya Evaluasi BOS SD	Terselenggaranya Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SAKIP)	Terselenggaranya Pengawasan Desa	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ZI)		Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (BK+Identifikasi Titik Rawan Gratifikasi)	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (MCP+LHKAN)	Terselenggaranya Kegiatan Dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (SPIP+RR+MR SPBE)	
YANUARITA ROHMATUL LAILI	Auditor Ahli Pertama	Terselenggaranya Kegiatan Reviu LKJP	Terselenggaranya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS	Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SAKIP)	Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Pemerintah Desa	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (ZI)		Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Identifikasi Titik Rawan Gratifikasi)	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (MCP, LHKAN)	Terselenggaranya Kegiatan Dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (SPIP+RR+MR SPBE)	
MOH. GIRI SANTOSO	Auditor Ahli Muda	Terselenggaranya Reviu LKJP		Terselenggaranya Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SAKIP)	Terselenggaranya Pengawasan Desa	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ZI)		Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (WBS+Identifikasi Titik Rawan Gratifikasi)	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (LHKAN)	Terselenggaranya Kegiatan Dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (SPIP+RR+MR SPBE)	

Gambar 1.5 Matrik Peran Hasil Bidang Investigasi Inspektorat Kabupaten Jombang

1.5 Peta Proses Bisnis

Inspektorat Kabupaten Jombang telah menetapkan Proses Bisnis agar tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Peta proses bisnis Inspektorat Kabupaten Jombang menggunakan level/tingkatan, yakni dari level 0, level 1, level 2 sampai dengan terpetakan lintas fungsi.



Gambar 3.3 Peta Proses Bisnis Level 0, Level 1 dan Level 2 Inspektorat Kab. Jombang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah, mendefinisikan peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Tujuan diadakannya Proses Bisnis adalah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai Proses Bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, serta memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai Proses Bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta Proses Bisnis yang dimiliki instansi pemerintah dan pemerintah daerah, berdasarkan tingkatannya dimulai dari peta Proses Bisnis level 0, level 1, sampai dengan peta Proses Bisnis level-n.

Adapun peta proses bisnis Inspektorat Kabupaten Jombang dari Level 0 hingga Level 5, sebagai berikut :

Level 0 Proses Bisnis Inspektorat

Level 1 P.14 Peningkatan Akuntabilitas Dan Reformasi Birokrasi

Level 2 P.14.3 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Level 3 P.14.3.1 Meningkatkan kapabilitas APIP

Level 3 P.14.3.2 Meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)

Level 3 P.14.3.3 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat

Level 4 P.14.3.1.1 Menjamin efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Level 4 P.14.3.1.2 Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola

Level 4 P.14.3.2.1 Meningkatkan Lingkungan pengendalian

Level 4 P.14.3.2.2 Meningkatkan Penilaian risiko

Level 4 P.14.3.2.3 Meningkatkan Kegiatan Pengendalian

Level 4 P.14.3.2.4 Meningkatkan kegiatan informasi dan komunikasi

Level 4 P.14.3.2.5 Meningkatkan pemantauan dan pengendalian intern

Level 4 P.14.3.3.1 Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai dengan aturan

Level 4 P.14.3.3.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian

Level 4 P.14.3.3.3 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan BMD

Level 4 P.14.3.3.4 Meningkatkan kualitas administrasi pengelolaan keuangan

Level 4 P.14.3.3.5 Meningkatkan kualitas pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Level 5 P.14.3.1.1.1 Meningkatkan kualitas Audit

Level 5 P.14.3.1.1.2 Meningkatkan kualitas Reviu

Level 5 P.14.3.1.1.3 Meningkatkan kualitas Monitoring dan Evaluasi

Level 5 P.14.3.1.2.1 Meningkatkan kualitas asistensi

Level 5 P.14.3.1.2.2 Meningkatkan kualitas fasilitasi dan konsultasi

Level 5 P.14.3.2.1.1 Mengawal survei penilaian integritas

Level 5 P.14.3.2.1.2 Pembelajaran anti korupsi dan sosialisasi

Level 5 P.14.3.2.1.3 Menyusun perbub atau aturan kode etik sesuai dengan tugas dan fungsi

Level 5 P.14.3.2.2.1 Melaksanakan Identifikasi risiko

Level 5 P.14.3.2.2.2 Melaksanakan Analisa risiko

Level 5 P.14.3.2.3.1 Melakukan Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah

Level 5 P.14.3.2.3.2 Melakukan Pembinaan sumber daya manusia

Level 5 P.14.3.2.3.3 Melakukan Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

Level 5 P.14.3.3.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai dengan aturan

Level 5 P.14.3.3.2.2 Melaksanakan pengelolaan kepegawaian Inspektorat

1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Jombang memperoleh nilai **82,53 %** dengan kategori **(A) Memuaskan**. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Hasil Evaluasi Tahun 2023

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,41	88,04
2	Pengukuran Kinerja	30%	24,32	81,07
3	Pelaporan Kinerja	15%	13,39	89,29
4	Evaluasi Kinerja	25%	18,41	73,63
Total		100%	82,53	

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Jombang mengalami peningkatan yang semula 81,59 menjadi 82,53 (A). Hal ini disebabkan dengan adanya kenaikan capaian nilai komponen pelaporan dibandingkan tahun 2022. Beberapa gambaran dan rekomendasi terkait dengan kualitas pelaporan kinerja dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (sustainability) dalam implementasi SAKIP tahun 2023 sbb :

1. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Kondisi Evaluasi

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 26,41 dari bobot 30% atau dengan capaian 88,04% (BB) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria telah terpenuhi seluruhnya (100%) sesuai mandat kebijakan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

a) Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja sasaran kurang menantang.

Penetapan target pada 2 indikator sasaran terlalu kecil (Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP) dan belum tertuang dengan detail pada definisi operasional, meskipun sudah dijelaskan dengan singkat cara pencapaiannya. (2.03.04)

b) Target jangka menengah atas renstra telah dimonitoring pencapaiannya terhadap tahun berjalan namun belum dapat menggambarkan hambatan pencapaian target dan rekomendasi perbaikan yang dapat

diterapkan/diwujudkan dalam langkah-langkah program/kegiatan ataupun subkegiatan. (2.03.04)

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 24,32 dari bobot 30% atau dengan capaian 81,07% (BB) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria telah terpenuhi seluruhnya (100%) sesuai mandat kebijakan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

a) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan sebagaimana penggunaan aplikasi TPP melalui *e-office* kabupaten, namun atas pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian pada pencapaian kinerja, strategi, kebijakan dan anggaran dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien yaitu belum dimanfaatkan untuk identifikasi program/kegiatan/sub kegiatan maupun rencana aksi yang kurang berdampak pada pencapaian kinerja.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 13,39 dari bobot 15% atau dengan capaian 89,29% (BB) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria telah terpenuhi seluruhnya (100%) sesuai mandat kebijakan, namun terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

a) Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan untuk dasar dilakukan upaya perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya dan penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja sebagai contoh dalam melakukan penyesuaian anggaran hanya didasarkan pada adanya kebijakan dari pemerintah, adanya target kinerja yang telah tercapai diawal tidak dijadikan dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 18,41 dari bobot 25% atau dengan capaian 73,63% (B) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%), namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

a) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti namun belum dimanfaatkan dengan maksimal dalam upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja (peningkatan capaian kinerja outcome) serta mendukung dalam proses efektivitas dan efisiensi kinerja.

2. Saran Perbaikan/Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Inspektur Kabupaten Jombang, agar :

- a) Melakukan evaluasi atas target yang akan ditetapkan dengan berdasarkan pada realisasi capaian target tahun sebelumnya, hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan serta memberikan narasi cara pencapaian target yang telah dipasang dengan memberikan narasi keterhubungan mulai dari subkegiatan sampai dengan sasaran OPD.
- b) Memerintahkan kepada tim penyusun dokumen SAKIP untuk melakukan revisi atas hasil monitoring target jangka menengah dalam Renstra tidak hanya monitoring pada program dan kegiatan, melainkan juga pada target kinerja, dan adanya bukti nyata tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan serta menyajikan hambatan dan rekomendasi penyelesaiannya.
- c) Pada saat penyusunan dokumen perencanaan kinerja selanjutnya memperhatikan sasaran setiap program, kegiatan dan sub kegiatan antar dokumen perencanaan kinerja sehingga setiap aktivitas (rumusan kinerja individu) yang dilaksanakan akan mendukung kinerja yang ingin dicapai dan dapat diukur dan dipantau secara berjenjang.
- d) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisa yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja sehingga informasi dalam laporan kinerja dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja.
- e) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria “SMART” serta menjadi saran dan masukan pengambil kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

TUJUAN :

“Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi”

Untuk mewujudkan tujuan yang dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Jombang, maka sasaran strategis yang dicapai adalah “Meningkatnya Hasil Pengawasan yang berkualitas dan akuntabel” dan “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah”.

Sebagai tolok ukur pencapaian sasaran strategis tersebut maka Inspektorat Kabupaten Jombang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Maturitas SPIP
2. Kapabilitas APIP
3. Nilai Evaluasi AKIP PD

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - b. Pendampingan dan Asistensi

2.2. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahun 2023 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2023. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023. Rencana kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2023.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara Inspektur Kabupaten Jombang dan tanggung jawab kinerja dengan Bupati Jombang dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2023 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola yang didukung dengan program/kegiatan yang didanai oleh APBD Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Maturitas SPIP	Level 3 (3,2)
		Kapabilitas APIP	Level 3
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	A (82)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
A.	Program Utama	Rp. 874.578.650	P-APBD TA 2023
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 642.235.250	P-APBD TA 2023
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 232.343.400	P-APBD TA 2023
B.	Program Penunjang	Rp. 13.035.04.299	P-APBD TA 2023
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.035.014.299	P-APBD TA 2023

Sumber : DPPA Inspektorat Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dijelaskan bahwa dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Jombang mengampu 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah.

Pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP.

Maturitas SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian Maturitas SPIP dilakukan oleh BPKP dengan memberi Level atas tingkatan pemenuhan indikator penilaian SPIP Kabupaten/Kota. Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Penilaian Kapabilitas APIP dilakukan oleh BPKP yang terdiri atas 2 komponen dan 6 elemen. Hasil penilaian berupa level APIP.

Pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah. Nilai ini diperoleh dari hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh APIP Kabupaten Jombang.

BAB III

AKUNTABILITAS

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2023. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2023 disajikan juga dalam bab ini. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data kinerja selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	> 110% - 120%	Istimewa (Sangat Berhasil)
2.	>90% – 110%	Baik (Berhasil)
3.	>70% - 80%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4.	>50% - 70%	Kurang
5.	0% - 50	Sangat Kurang

Sumber : Peraturan Bupati Jombang No. 47 Tahun 2022

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023, Inspektorat Kabupaten Jombang mendukung Misi RPJMD Jombang ke-1 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional” tujuan RPJMD ke 1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas dengan Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi.

Indikator tercapainya sasaran tersebut adalah Indeks Good Governance (IGG). Adapun sasaran tujuan tersebut adalah “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi” dengan indikator sasaran yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran Kabupaten tersebut menjadi tujuan Inspektorat Kabupaten Jombang yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi” dengan indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi maka Inspektorat yang mempunyai tupoksi dibidang urusan pengawasan terutama terkait evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten dan Evaluasi SAKIP OPD, pada tahun 2023 melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah terkait Evaluasi RB Kabupaten
2. Melaksanakan Koordinasi dengan OPD terkait;
3. Sebagai Tim RB Kabupaten dengan OPD terkait;
4. Melaksanakan Koordinasi Ke Biro Organisasi Provinsi;
5. Melakukan kegiatan evaluasi SAKIP OPD
6. Melakukan Reviu LPPD Kabupaten
7. Melaksanakab Reviu RPD Kabupaten Jombang;

Langkah-langkah sebagaimana tersebut diatas telah dilaksanakan Inspektorat untuk meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang.

Dari Kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator Sasaran Kabupaten sebagaimana tersebut diatas maka Pengukuran Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	Maturitas SPIP	Level 3 (3,2)	Level 3 (3,241)	101,28%	Baik (Berhasil)
		Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Baik (Berhasil)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	Nilai A (82)	Nilai A (82,53)	100,65%	Baik (Berhasil)

Sumber: diolah, Inspektorat 2023

Dari tabel di atas terdapat dua sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja. Pada Tahun 2023, semua realisasi indikator telah mencapai target yang ditetapkan yaitu telah mencapai 100% bahkan lebih, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tingkat Maturitas SPIP Inspektorat Kabupaten Jombang diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP Provinsi Jawa Timur dengan hasil Level 3 nilai 3,241 **(data terlampir)**.
2. Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Jombang diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP Provinsi Jawa Timur dengan hasil Level 3 **(data terlampir)**.
3. Hasil Nilai Evaluasi AKIP PD Inspektorat Kabupaten Jombang diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Jombang dengan nilai 82,53 (A). **(data terlampir)**

Selanjutnya semua indikator kinerja telah memenuhi klasifikasi Baik (Berhasil) berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022.

Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada Tahun 2023, terdapat dua sasaran strategis yang dicerminkan dalam capaian 3 (tiga) indikator kinerja telah dilakukan pengukuran dan dari 3 (tiga) dari indikator kinerja tersebut telah mencapai target yang ditetapkan pada Tahun 2023. Dengan adanya RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023, maka diikuti dengan penyusunan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023. Secara rinci, indikator kinerja akan dilakukan penjabaran sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas dan Akuntabel

Sasaran “Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas dan Akuntabel” diukur menggunakan 2 (dua) indikator, sebagai berikut:

1. Maturitas SPIP.

Rumusan indikator kinerja adalah Level Maturitas SPIP. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu :

Level	Tingkat	Karakteristik SPIP
0	Belum Ada	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern
1	Rintisan	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
2	Berkembang	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
3	Terdefinisi	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
4	Terkelola dan Terukur	K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
5	Optimum	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

Sejalan dengan hasil penilaian maturitas SPIP yang telah dilaksanakan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) , Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Jombang sesuai laporan hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023 pada

Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor PE.09.03/LHP-1098/PW13/3/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar **3,241**. Dengan rincian penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Penilaian BPKP Tahun 2023

No.	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,1423	3,241	-0,9013
2	Manajemen Risiko Indeks	4,228	2,913	-1,315
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	4,57	2,81	-1,76

Sumber : LHE Maturitas SPIP Kabupaten Jombang, BPKP Perwakilan Prov Jatim Tahun 2023

Perubahan nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP dapat dijelaskan sbb :

- 1) Penurunan pada hasil penilaian Penetapan Tujuan. Hal ini disebabkan :
 - a) Sebagian besar sasaran program dan kegiatan belum menggambarkan substansi program dan kegiatan
 - b) Penetapan indikator kinerja sasaran pemda, sasaran OPD, program ataupun kegiatan belum didukung dengan pertimbangan yang terukur bagaimana sasaran/program/kegiatan dapat dicapai
 - c) Terdapat indikator yang tidak cukup untuk mengukur keberhasilan program/kegiatan
 - d) Terdapat penetapan target sasaran level pemda dan perangkat daerah belum mempertimbangkan capaian tahun-tahun sebelumnya
 - e) Terdapat target sub kegiatan yang tidak mendukung target perencanaan level di atasnya.
- 2) Penurunan pada hasil penilaian Struktur dan Proses

Penurunan hasil penilaian Struktur dan Proses dilakukan terhadap parameter MRI dan IEPK. Perbaikan tersebut terkait dengan beberapa sub unsur SPIP yaitu :

 - a) Penegakan Integritas dan Nilai Etika
 - b) Kepemimpinan yang kondusif
 - c) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
 - d) Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
 - e) Analisis Risiko

- f) Informasi yang Relevan
 - g) Pemantauan Berkelanjutan
 - h) Evaluasi Terpisah
- 3) Penurunan pada Penilaian Pencapaian Tujuan, yaitu :
- a) Pada Penilaian Pencapaian Tujuan Efektifitas dan Efisiensi dilakukan penurunan terhadap capaian Outcome dan Output
 - b) Pada Penilaian Pencapaian Pencapaian Tujuan Keandalan Laporan Keuangan terdapat temuan berulang dalam LHP Audit BPK dalam 5 Tahun terakhir.

2. Kapabilitas APIP.

Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Penilaian Kapabilitas APIP terdiri atas 2 komponen dan 6 elemen, yaitu:

Tabel 3.4. Pembobotan Penilaian Kapabilitas APIP

KOMPONEN	BOBOT (%)	ELEMEN	BOBOT (%)
Dukungan Pengawasan	60	Pengelolaan SDM	30
		Praktik Profesional	30
		Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	10
		Budaya dan Hubungan Organisasi	10
		Struktur Tata Kelola	20
Aktivitas Pengawasan dan Kualitas Pengawasan	40	Peran dan Layanan APIP	100

Sumber : LHE Kapabilitas APIP Tahun 2023

Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumberdaya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Semakin tinggi nilai level kapabilitasnya maka semakin baik upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat

melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Hasil *Quality Assurance* yang dilakukan BPKP Perwakilan Jawa Timur sesuai Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor : PE.09.03/LHP-1149/PW13/6/2023 tanggal 29 Desember 2023 terhadap 18 (delapan belas) topik untuk periode Penilaian Mandiri Tahun 2023 kapabilitas APIP level 3 menyimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Jombang berada pada “**Level 3**” (**delivered**). Sebagaimana uraian berikut :

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2.	Praktik Profesional	3	0,54
3.	Akuntabilitas Manajemen Kinerja	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,00

Untuk meningkatkan kapabilitas Inspektorat, BPKP menyarankan agar:

1. Mengajukan kepada Bupati Jombang perlunya dukungan terhadap pelaksanaan tugas Inspektorat Pemenuhan kebutuhan SDM, penyediaan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi), penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern;
2. Melakukan *self assessment* atas kinerja APIP dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Jombang;
3. Menginstruksikan kepada para Irban untuk:
 - a. Melaksanakan audit ketaatan atas area-area yang berisiko tinggi terjadinya *fraud*/penyimpangan seperti perijinan dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan audit ketaatan atas program-program strategis pemda maupun OPD;
 - b. Melaksanakan audit kinerja atas program strategis pemda yang diampu beberapa OPD yang dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan dalam tata kelola, risiko serta pengendalian organisasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan prioritas dan/atau keunggulan daerah;

- c. Mendorong efektivitas pengelolaan risiko strategis Pemda, risiko strategis OPD, dan risiko operasional OPD melalui kegiatan fasilitasi/bimtek/pendampingan. Selanjutnya memanfaatkan register risiko strategis Pemda dan register risiko OPD untuk mengembangkan strategi dan rencana pengawasan sebagai dasar penyusunan PKPT

Sasaran 2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah” diukur menggunakan 1 (satu) indikator, yaitu Nilai Evaluasi AKIP PD

Nilai Evaluasi AKIP PD

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Komponen penilaian SAKIP antara lain :

Komponen dan Bobot Penilaian SAKIP Perangkat Daerah

KOMPONEN/SUB KOMPONEN/KRITERIA	BOBOT (%)
PERENCANAAN KINERJA	30,00
PEMENUHAN	6,00
KUALITAS RENSTRA	9,00
IMPLEMENTASI	15,00
PENGUKURAN KINERJA	30,00
PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA	6,00
KUALITAS PENGUKURAN	9,00
IMPLEMENTASI PENGUKURAN	15,00
PELAPORAN KINERJA	15,00
PEMENUHAN PELAPORAN	3,00
PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	4,50
PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	7,50
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00
PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	5,00
KUALITAS EVALUASI	7,50
PEMANFAATAN EVALUASI	5,00

Sumber : LHE SAKIP Inspektorat Tahun 2023

Berdasarkan Evaluasi SAKIP Inspektorat tahun 2023 sebagai berikut :

**Penilaian SAKIP Inspektorat Kabupaten Jombang
Tahun 2023**

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,41	88,04
2	Pengukuran Kinerja	30%	24,32	81,07
3	Pelaporan Kinerja	15%	13,39	89,29
4	Evaluasi Kinerja	25%	18,41	73,63
Total		100%	82,53	

Sumber : LHE SAKIP Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Inspektur Kabupaten Jombang, agar :

- 1) Melakukan evaluasi atas target yang akan ditetapkan dengan berdasarkan pada realisasi capaian target tahun sebelumnya, hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan serta memberikan narasi cara pencapaian target yang telah dipasang dengan memberikan narasi keterhubungan mulai dari subkegiatan sampai dengan sasaran OPD.
- 2) Memerintahkan kepada tim penyusun dokumen SAKIP untuk melakukan revisi atas hasil monitoring target jangka menengah dalam Renstra tidak hanya monitoring pada program dan kegiatan, melainkan juga pada target kinerja, dan adanya bukti nyata tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan serta menyajikan hambatan dan rekomendasi penyelesaiannya.
- 3) Pada saat penyusunan dokumen perencanaan kinerja selanjutnya memperhatikan sasaran setiap program, kegiatan dan sub kegiatan antar dokumen perencanaan kinerja sehingga setiap aktivitas (rumusan kinerja individu) yang dilaksanakan akan mendukung kinerja yang ingin dicapai dan dapat diukur dan dipantau secara berjenjang.
- 4) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisa yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja sehingga informasi dalam laporan kinerja dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja.

- 5) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria “SMART” serta menjadi saran dan masukan pengambil kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini (Tahun 2023)

Target dan realisasi kinerja pada Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Jombang yaitu “Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas dan Akuntabel” dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel						
1	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	1	Maturitas SPIP	Level 3 (3,2)	Level 3 (3,241)	101,28%
		2	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	3	Nilai Evaluasi AKIP PD	Nilai A (82)	Nilai A (82,53)	100,65%

Sumber : diolah, Inspektorat 2023

Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran secara rata-rata mencapai 100% bahkan lebih. Capaian ini diperoleh dari rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis OPD. Sasaran ini didukung oleh seluruh Inspektur Pembantu Bidang, Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Umum yang ada di Inspektorat. Keberhasilan pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis ini tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan kualitas capaian kegiatan yang dilakukan melalui :

a) Maturitas SPIP

1. Koordinasi dan Konsultasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi JawaTimur untuk melakukan penilaian Maturitas SPIP.
2. Melakukan rekonsiliasi tindak lanjut hasil pengawasan antara APIP dengan OPD terkait.
3. Melakukan pendampingan dan reviu Register Risiko pada seluruh OPD dengan menetapkan daftar risiko atas kegiatan pokok dan menetapkan

rencana tindak pengendalian.

4. Melaksanakan Evaluasi SPIP Kabupaten.
5. Melaksanakan Tata Kelola Pendapatan/Retribusi sebagai upaya pengendalian penerimaan pendapatan.
6. Melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang sebagai upaya memberikan keyakinan terbatas terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan kepada BPK.
7. Melaksanakan evaluasi Reformasi Birokrasi (SAKIP OPD, RB Kabupaten dan Zona Integritas) untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD dan Kabupaten Jombang.

b) Kapabilitas APIP

1. Pendampingan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pengisian aplikasi IACM serta dokumen-dokumen untuk kelengkapan elemen.
2. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada Level 3 dengan mengimplementasikan Key Process Area (KPA) secara baik dan terus menerus, serta mulai mempersiapkan diri untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi.
3. Melakukan *Self Assessment* secara berkala untuk menjaga dan mempertahankan Kapabilitas APIP level 3 pada 6 elemen Kapabilitas APIP.
4. Mengikuti webinar dan seminar terkait peningkatan kapabilitas APIP yang diselenggarakan baik oleh BPKP Pusat Jakarta maupun oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur.

c) Nilai Evaluasi AKIP PD

1. Melaksanakan reviu Dokumen Perencanaan untuk memastikan adanya keterpaduan perencanaan antara RPJMD, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Inspektorat dan melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi.
2. Koordinasi secara intens dengan BPKP dalam upaya pencapaian target kinerja utama yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja agar tercapai 100% atau lebih (SPIP dan Kapabilitas APIP).
3. Telah menggunakan aplikasi (link SAKIP) dalam penyusunan dan

pengumpulan data kinerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas pada proses pengumpulan data kinerja setiap tribulan.

4. Melaksanakan koordinasi dengan tim evaluasi internal dan tim penyusun dokumen SAKIP setiap tribulan.

Selanjutnya untuk Tahun 2023 telah dilakukan evaluasi Indikator Sub Kegiatan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dalam rangka penyamaan indikator sub kegiatan di seluruh Indonesia.

Terkait Kapabilitas APIP yang ditargetkan Level III, hal ini sesuai dengan perintah Presiden RI dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2015. Penilaian kapabilitas seluruh organisasi APIP di Indonesia merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah secara nasional yang dituangkan dalam ketentuan, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 dimana APIP diharapkan memiliki kapabilitas pada Level 3 (integrated);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan 2 (dua) Tahun Terakhir

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi		
					2023	2022	2021
1	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas Dan akuntabel	1	Persentase Tindak Lanjut Selesai (Administrasi dan Keuangan)	N/A			N/A
		2	Persentase OPD yang telah melaksanakan ZI menuju WBK	N/A			N/A
		3	Persentase LK SKPD sesuai SAP	N/A			N/A
		4	Nilai Reformasi Birokrasi	N/A			N/A

	5	Maturitas SPIP	Level 3 (3,2)	Level 3 (3,241)	Level 3 (3,157)	Level 3 (3,346)
	6	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	7	Nilai Evaluasi AKIP PD	A (82)	A (82,53)	A (81,59)	A (82,92)

Sumber : diolah, Inspektorat 2023

Dari tabel 3.4 dapat diketahui bahwa hanya indikator Kinerja Sasaran “Maturitas SPIP” yang dapat diperbandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya. Hal ini tampak pada Nilai Maturitas SPIP pada Tahun 2022 sebesar 3,157 meningkat pada Tahun 2023 menjadi 3,241.

Sesuai rekomendasi BPKP bahwa untuk meningkatkan Maturitas SPIP, diharapkan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk :

- a) Mengajukan kepada Bupati Jombang perlunya dukungan terhadap pelaksanaan tugas Inspektorat Pemenuhan kebutuhan SDM, penyediaan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi), penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern;
- b) Melakukan self assessment atas kinerja APIP dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Jombang;
- c) Menginstruksikan kepada para Irban untuk:
 - i. Melaksanakan audit ketaatan atas area-area yang berisiko tinggi terjadinya fraud/penyimpangan seperti perijinan dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan audit ketaatan atas program-program strategis pemda maupun OPD;
 - ii. Melaksanakan audit kinerja atas program strategis pemda yang diampu beberapa OPD yang dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan dalam tata kelola, risiko serta pengendalian organisasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan prioritas dan/atau keunggulan daerah;

- iii. Mendorong efektivitas pengelolaan risiko strategis Pemda, risiko strategis OPD, dan risiko operasional OPD melalui kegiatan fasilitasi/bimtek/pendampingan. Selanjutnya memanfaatkan register risiko strategis Pemda dan register risiko OPD untuk mengembangkan strategi dan rencana pengawasan sebagai dasar penyusunan PKPT

Untuk indikator Kinerja Kapabilitas APIP telah mencapai target yaitu Level 3 sehingga capaiannya 100%. Sedangkan Nilai Evaluasi AKIP PD mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 karena peningkatan pada komponen pelaporan kinerja.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Akhir Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target akhir Renstra yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Capaian Realisasi
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan Akuntabel						
1	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	1	Maturitas SPIP	Level 3 (3,241)	Level 3 (3,2)	90,03%
		2	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	3	Nilai Evaluasi AKIP PD	Nilai A (82,53)	Nilai A (83)	99,43%

Sumber : diolah, Inspektorat 2023

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa kinerja Inspektorat pada Tahun 2023 secara garis besar mengalami progress positif dan telah sesuai dengan yang telah direncanakan bahkan 2 (dua) indikator melebihi target, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Target Maturitas SPIP tercapai sebesar 90,03%, sehingga dinyatakan pada kategori Baik (Berhasil).
2. Target Kapabilitas APIP telah tercapai sebesar 100%, sehingga dinyatakan pada kategori Baik (Berhasil).
3. Target Nilai Evaluasi AKIP PD yang telah tercapai sebesar 99,43% sehingga dinyatakan pada kategori Baik (Berhasil).

3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional

Sebagaimana rekomendasi Tim Evaluator SAKIP Tahun 2022 (Tahun n-1) pada Rekomendasi keempat yaitu “ *4. Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level daerah/nasional pada dokumen LKJIP.*” Maka data pembanding yang dipakai oleh Inspektorat Kabupaten Jombang untuk membandingkan realisasi kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang yang dapat dipakai yaitu data pembanding dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Jombang.

Adapun untuk level daerah yang dapat dipakai adalah Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Jombang yang diperoleh nilai tersebut dari Kementerian PAN dan RB.

Sedangkan terkait untuk target Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP, untuk level daerah yang dapat dipakai adalah Laporan Penilaian Maturitas SPIP Provinsi Jawa Timur dan Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Jombang.

Adapun data perbandingannya dapat dijelaskan sbb. :

**Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi
Kinerja di Level Nasional/Internasional**

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Daerah/ Provinsi	Ket.
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan Akuntabel						
1	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	1	Maturitas SPIP	Level 3 (3,241)	Level 3 (3,141)	Dibandingkan dengan Nilai Maturitas SPIP Provinsi Jawa Timur
		2	Kapabilitas APIP	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,00)	Dibandingkan dengan Nilai Maturitas SPIP Provinsi Jawa Timur
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	3	Nilai Evaluasi AKIP PD	Nilai A (82,53)	Nilai BB (72,14)	Dibandingkan dengan Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Jombang

Sumber : Data diolah, 2023

Dari data tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi 2 (dua) indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang melebihi dari realisasi kinerja di atasnya, yaitu “Maturitas SPIP” dan “Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah”

Pada indikator “Maturitas SPIP”, Pemerintah Kabupaten Jombang lebih unggul daripada realisasi level di atasnya, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bahwa realisasi Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Jombang tercapai 3,241 (Level 3), sedangkan realisasi Maturitas SPIP Provinsi Jawa Timur tercapai 3,141 (Level 3). Hal ini berarti realisasi indikator kinerja Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Jombang lebih unggul 0,2 poin nilai.

Pada indikator “Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah”, Inspektorat Kabupaten Jombang lebih unggul daripada realisasi level di atasnya, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jombang. Bahwa realisasi Evaluasi AKIP PD Inspektorat Kabupaten Jombang tercapai 82,53 (Nilai A), sedangkan realisasi Nilai Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Jombang 72,14 (Nilai BB). Hal ini berarti realisasi indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP PD lebih unggul dari Pemerintah Kabupaten Jombang 10,39 poin nilai.

3.1.5. Analisis Realisasi Kinerja

Pencapaian kinerja indikator sasaran “Maturitas SPIP”, “Kapabilitas APIP” dan “Nilai Evaluasi AKIP PD” tidak diperoleh dengan mudah, ada faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaiannya yang terdokumentasi dalam tabel berikut :

Tabel 3.7 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat serta Tindak Lanjut Sasaran

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut
- Adanya komitmen dari segenap pegawai Inspektorat dalam upaya Peningkatan Level Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, dan Nilai SAKIP OPD. - Adanya komunikasi yang efektif antara staf, rekan kerja maupun dengan atasan baik di level staf maupun pimpinan. Serta komunikasi yang efektif antara APIP, BPKP, Aparat Pengawas Eksternal (BPK RI), Auditee dan Aparat Penegak Hukum. - Adanya upaya terus menerus oleh APIP kepada OPD dalam memetakan risiko di masing-masing OPD. - Kerjasama yang baik intern Inspektorat	- Register Risiko dalam mencapai target kinerja OPD belum menjadi perhatian dari OPD. - Kurangnya <i>update</i> data atas kegiatan Inspektorat yang mendukung penilaian Kapabilitas APIP. - Jenis Pemeriksaan dan Jumlah Obyek Pemeriksaan yang berupa mandatory dari pemerintah pusat atas kondisi terkini menyebabkan banyaknya penugasan di luar PKPT.	- Melakukan pendampingan konsultasi kepada auditan (OPD) berupa sosialisasi , revidi Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian pada seluruh OPD. - Melakukan <i>update</i> data secara berkala atas pemenuhan elemen penilaian kapabilitas APIP. - Melakukan koordinasi yang baik dan secara terus menerus dengan BPKP dalam upaya mempertahankan Kapabilitas APIP (Level 3). - Dilaksanakannya Perubahan PKPT untuk penyesuaian atas tugas mandatory. - Secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja intern Inspektorat.

Sumber : diolah, Inspektorat 2023

3.2. REALISASI ANGGARAN

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Maturitas SPIP, didukung oleh program sebagai berikut : Program Penyelenggaraan Pengawasan

Sehubungan dengan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, maka dilakukan penilaian Level Maturitas SPIP. Anggaran yang dialokasikan untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan dengan total anggaran program anggaran Rp. 642.235.250,00. Hasil-hasil pelaksanaan program penyelenggaraan pengawasan yang telah dicapai pada Tahun 2023,

antara lain :

- a. Pelaksanaan penilaian Maturitas SPIP dengan pendampingan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dengan hasil Quality Assurance dari BPKP Perwakilan Jawa Timur bahwa Kabupaten Jombang Maturitas SPIP berada pada Level 3 dengan nilai 3,241.
 - b. Pelaksanaan penilaian kapabilitas APIP secara self asesment telah mencapai Level 3.
 - c. Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah meliputi probity audit, audit kinerja, Reviu DAK, Reviu PAPBJ, Monitoring Kontrak Kritis.
 - d. Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi Monitoring dan Evaluasi PPRG, Pengawasan Kepatuhan, Monitoring dan Evaluasi BOS/BOSDA, audit dana hibah dan bantuan sosial.
 - e. Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja meliputi Reviu Perencanaan dan Penganggaran (RKA, P-RKA, KUA PPAS, P-KUA PPAS, RKPD, P-RKPD), Reviu LPPD, Reviu Lain-lain (Reviu HPS, Reviu HSPK/ASB, Reviu SSH), dan Reviu DAK.
 - f. Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan meliputi Reviu LKPD dan Reviu LK SKPD.
 - g. Terlaksananya Pengawasan Desa di 150 Desa.
 - h. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik pengawasan BPK maupun APIP, hal ini ditunjukkan dengan terbitnya Laporan Tindak Lanjut dan Laporan Ikhtisar Pengawasan.
 - i. Terlaksananya pemantauan kerugian daerah oleh Tim TPKD dan Majelis Kerugian Daerah.
 - j. Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
4. Kapabilitas APIP, didukung oleh program sebagai berikut : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi.
- Sehubungan dengan penguatan Kapabilitas APIP dalam memperkuat kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif, maka dilakukan penilaian Kapabilitas APIP. Anggaran yang dialokasikan untuk Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang terdiri atas 2 (dua)

kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan dengan total anggaran program anggaran Rp. 232.343.400,00.

Hasil-hasil pelaksanaan program penyelenggaraan pengawasan yang telah dicapai pada Tahun 2023, antara lain :

- a. Telah dilaksanakan penerbitan perumusan kebijakan teknis terkait pengawasan di Inspektorat Kabupaten Jombang yaitu Program Kerja Pengawasan Tahunan serta Perubahan Tahun 2023.
 - b. Telah dilaksanakan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Jombang tiap tribulan, Penilaian Zona Integrasi untuk 4 OPD, Reviu Registrasi Resiko untuk seluruh OPD di Kabupaten Jombang, Evaluasi SPIP untuk 10 OPD (salah satunya Kabupaten), Sosialisasi Gratifikasi yang intens, Pelaksanaan upaya pencegahan korupsi melalui *Monitoring Center For Prevention* Korsupgah KPK serta peran aktif Tim Saber Pungli dan Pelaksanaan Verifikasi LHKAN seluruh PNS Kabupaten Jombang (dikecualikan wajib lapor LHKPN)
5. Nilai Evaluasi AKIP PD, didukung oleh program sebagai berikut : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Sehubungan dengan pencapaian Nilai SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**SAKIP**) yang digunakan untuk mengetahui apakah kementerian, lembaga, pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, maka indikator kinerja ini mengampu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran yang dialokasikan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas 8 (delapan) kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan dengan total anggaran program anggaran Rp. 13.035.014.299,00.
- Hasil-hasil pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang telah dicapai pada Tahun 2023, antara lain:
- a. Telah dilaksanakan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu Penyusunan Renstra Tahun 2024-2026, Renja 2024 dan Perubahan Renja 2023.
 - b. Telah dilaksanakan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu pemenuhan gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai selama 14 bulan (termasuk gaji 13 dan Tunjangan Hari Raya atau

disebut gaji 14).

- c. Telah terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang meliputi pemenuhan kebutuhan peralatan listrik, logistik kantor, bacaan harian, perlengkapan kantor dan kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar daerah
- d. Telah terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi pemenuhan kebutuhan listrik kantor, kebutuhan pelayanan telepon, pemenuhan alat tulis kantor, alat kebersihan, tenaga kebersihan pihak ketiga, jasa pengharum ruangan, dan honor pengelola keuangan
- e. Telah terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi pemeliharaan 1 unit kendaraan dinas jabatan, 18 unit kendaraan dinas operasional baik roda 2 maupun roda 4 dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor meliputi perbaikan/ pemeliharaan laptop, printer, AC kantor, dan perbaikan keramik rumah dinas.
- f. Telah terlaksananya kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya meliputi pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan guna mendukung kinerja APIP yaitu pengadaan mebel

3.2.1. Perbandingan realisasi kinerja dan realisasi anggaran

Realisasi Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran TA. 2023 dapat disajikan sbb. :

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %
Sasaran : Meningkatkan Hasil Pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	Maturitas SPIP	Level 3 (3,2)	Level 3 (3,241)	101,28			
	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100			
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	Nilai A (82)	Nilai A (82,53)	100,65			

	Rata-rata capaian Indikator Utama (Sasaran)			100,64			
SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	100	100,00	13.035.014.299	12.539.698.077	96,2
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut hasil Pengawasan selesai (APIP dan BPK)	93	86,41	92,91	642.235.250	632.077.172	98
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase kebijakan teknis pengawasan yang diterbitkan	100	100	100,00	232.343.400	225.376.695	97
	Persentase tindak lanjut selesai atas rekomendasi asistensi dan pendampingan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal	85	80	94,12			
	Rata-rata capaian Indikator Utama (Program)			96,76			
	JUMLAH TOTAL				13.909.592.949	13.397.151.944	96,3%

a

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian indikator utama (Sasaran) sebesar 100,64%, sedangkan rata-rata capaian indikator program tercapai 96,76% dan rata-rata capaian anggaran tahun 2023 sebesar 96,3%. Dapat disimpulkan bahwa sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 bahwa capaian realisasi kinerja utama, kinerja program dan anggaran Inspektorat Kabupaten Jombang dianggap pada kategori Baik (Berhasil).

3.2.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Efisiensi Anggaran

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat terlaksana dengan efisien yaitu penggunaan sumber daya khususnya anggaran seminimal mungkin dengan hasil kinerja yang berdaya guna tercapai sesuai yang telah direncanakan. Guna mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	%Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya hasil akuntabel	Maturitas SPIP	101,28%	96,2%	5,08%
		Kapabilitas APIP	100%	98%	2%
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	100,65%	97%	3,65%
	Rata-rata				3,58%

Sumber : diolah, Inspektorat 2023

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan tingkat capaian kinerja penggunaan sumber daya dari sasaran Meningkatkan hasil pengawasan yang berkualitas dan akuntabel dengan indikator sasaran :

a. Maturitas SPIP

Prosentase Efisiensi Kinerja dari Maturitas SPIP sebesar 5,08%.

b. Kapabilitas APIP

Prosentase Efisiensi Kinerja dari Kapabilitas APIP 2%

c. Nilai Evaluasi AKIP PD

Prosentase Efisiensi Nilai Evaluasi AKIP PD sebesar 3,65%.

2) Efisiensi Sumber Daya Manusia

Kebutuhan pegawai Berdasarkan Analisa Beban Kerja pemenuhan kebutuhan pegawai seharusnya sebanyak 65 orang Auditor, 7 orang pejabat struktural dan 10 Jabatan Fungsional Umum. Sampai dengan 31 Desember 2023 jumlah pemenuhan pegawai di Inspektorat Kabupaten Jombang sejumlah 72 orang, sehingga prosentase pemenuhan kebutuhan pegawai sebesar 87,81%. Dengan jumlah SDM yang masih terbatas namun capaian kinerja pada Tahun 2023 telah tercapai dengan predikat Baik (Berhasil) pada semua indikator Kinerja Sasaran yang mencapai sebesar 100% bahkan lebih.

Tabel 3.10 Efisiensi Sumber Daya Manusia

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Ketersediaan SDM	% Efisiensi
1	Meningkatnya hasil	Maturitas SPIP	101,28%	87,81%	12,83%

	pengawasan yang berkualitas dan akuntabel				
		Kapabilitas APIP	100%		
		Nilai Evaluasi AKIP PD	100,65%		

Sumber : diolah, Inspektorat 2023

Dari tabel di atas, terdapat efisiensi Sumber Daya Manusia sebesar 12,83% dari rata-rata capaian kinerja sebesar 100,64% dikurangi ketersediaan Sumber Daya Manusia sebanyak 72 orang atau 87,81%.

3) Efisiensi Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan kinerja perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang cukup dan dalam kondisi yang baik. Berikut sarana dan prasarana Inspektorat Kabupaten Jombang untuk menunjang kinerja OPD. Berikut disajikan Klasifikasi Aset/ Modal Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang :

Tabel 3.11 Klasifikasi Aset / Modal maupun Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah tersedia	Satuan	Keterangan	Jumlah Kebutuhan	Kekurangan
1.	Gedung Kantor	1	unit	Baik	1	0
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	10	unit	Baik/ Jumlah Kurang	12	-2
3.	Kendaraan Dinas Roda 2	10	unit	Baik	10	0
4.	Peralatan Lab	10	unit	Baik	10	0
5.	Pompa Air	2	unit	Baik	2	0
6.	Pendingin Ruangan	35	unit	Baik	40	-5
7.	Filling Besi/Metal	17	unit	Baik	17	0
8.	Rak Kayu	20	unit	Baik	20	0
9.	Meja Kayu	27	unit	Baik/ Jumlah Kurang	44	-17
10.	Meja Tulis	16	unit	Baik/ Jumlah Kurang	30	-14
11.	Kursi	114	unit	Baik/ Jumlah Kurang	134	-20
12.	Laptop	35	unit	Baik/ Jumlah Kurang	49	-14
13.	Printer	44	unit	Baik/ Jumlah Kurang	45	-1
14.	Meja Kerja Eselon	9	unit	Baik	7	2
	Jumlah	350			421	-71

Berdasar data di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan 31 Desember 2023 jumlah pemenuhan sarana dan prasarana di Inspektorat Kabupaten Jombang sejumlah 350 unit, dengan kebutuhan sarpras sejumlah 421 unit sehingga prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebesar 83,14%. Dengan jumlah sarpras yang masih terbatas namun capaian kinerja pada Tahun 2023 telah tercapai dengan predikat Baik (Berhasil) pada semua indikator Kinerja Sasaran bahkan ada yang mencapai lebih dari 100%. Berikut disajikan efisiensi sarana dan prasarana Inspektorat Kabupaten Jombang, sbb. :

Tabel 3.12 Efisiensi Sarana dan Prasarana

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Ketersediaan Sarpras	% Efisiensi
1	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	Maturitas SPIP	101,28%	83,14%	17,5%
		Kapabilitas APIP	100%		
		Nilai Evaluasi AKIP PD	100,64%		

Sumber : data diolah, 2023

Dari tabel di atas, terdapat efisiensi sarana prasarana sebesar 17,55% dari rata-rata capaian kinerja sebesar 100,64% dikurangi ketersediaan sarana prasarana sebanyak 350 unit atau 83,14%.

Capaian Kinerja Anggaran

Pengukuran pencapaian kinerja anggaran adalah berdasarkan persentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPPA APBD Tahun 2023. Adapun Jumlah APBD Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 13.909.592,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.441.701.788,00 atau mencapai 93,17% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.13 Jumlah Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI	% REALISASI PERUBAHAN	SALDO
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.035.014.299	12.539.698.077	96,2%	495.316.222
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.219.000	18.009.123	98,8%	209.877
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.334.650.769	10.891.231.215	96,1%	443.419.554
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	700.000	354.002	50,6%	345.998
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.135.000	79.083.209	99,9%	51.791
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	591.715.380	566.027.354	95,7%	25.688.026
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.862.500	81.704.400	99,8%	158.100
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	531.578.000	519.152.671	97,7%	12.425.329
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.153.650	384.136.103	96,7%	13.017.547
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	642.235.250	632.077.172	0,98	10.158.078
	9. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	622.162.150	614.100.672	98,7%	8.061.478
	10. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	20.073.100	17.976.500	89,6%	2.096.600
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	232.343.400	225.376.695	0,97	6.966.705
	11. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	26.109.200	26.057.945	99,8%	51.255
	12. Pendampingan dan Asistensi	206.234.200	199.318.750	96,6%	6.915.450
	TOTAL ANGGARAN	13.909.592.949	13.397.151.944	96,3%	512.441.005

Sumber : diolah, Data Tahun 2023

3.2. Upaya Perbaikan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkan-kembangkan budaya kinerja, selama tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator SAKIP Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai berikut :

1. Telah melakukan revisi target Maturitas SPIP melalui Kertas Kerja Penetapan Target untuk menentukan target yang sesuai.

2. Telah mengirim surat usulan kebutuhan anggaran dan telah dipenuhi pada awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 85.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaaan Gedung Kantor untuk pembangunan parkir kendaraan roda 4.
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang menggunakan Teknologi Informasi akan diterapkan pada Evaluasi SAKIP Tahun 2023 melalui aplikasi yang telah diluncurkan oleh Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Jombang untuk seluruh OPD.
4. Informasi terkait efisiensi atas sarana dan prasarana telah dicantumkan dalam laporan kinerja Tahun 2023.
5. Informasi dalam laporan kinerja dipakai sebagai dasar dalam penentuan perencanaan tahun berikutnya, dibuktikan dengan penyusunan kertas kerja penetapan target yang membahas capaian tahun sebelumnya
6. Realisasi kinerja di level daerah/ nasional telah dicantumkan dengan pembandingan Inspektorat Provinsi Jawa Timur (Kapabilitas APIP), Provinsi Jawa Timur (Maturitas SPIP) dan Pemerintah Kabupaten Jombang (Nilai AKIP)
7. Informasi dalam laporan kinerja dipakai sebagai masukan untuk perbaikan budaya kerja Inspektorat Kabupaten Jombang, hal ini dibuktikan dengan adanya rapat koordinasi setiap bulan dan tribulanan baik untuk membahas capaian kinerja maupun anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2023-2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang.

Secara umum pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah sebesar 100,64%. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis, Inspektorat Kabupaten Jombang mendapatkan alokasi dana APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 13.909.592.949,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.397.151.944,00 atau mencapai 96,3%.

Secara keseluruhan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jombang telah berada pada Baik (Berhasil) yaitu Maturitas SPIP mencapai 101,28%, Kapabilitas APIP mencapai 100%, dan Nilai Evaluasi AKIP PD mencapai 100,65%. Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang pada Tahun 2023 masih ditemui sejumlah kendala/hambatan yang akan menjadi fokus perbaikan kinerja sebagai berikut :

1. Masih terdapat rekomendasi hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti oleh *Auditee* atau OPD terkait.
2. Perlu ditingkatkan sosialisasi monitoring pengendalian risiko kepada OPD dalam mengidentifikasi Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian secara berkelanjutan dan memadai sebagai proses penerapan manajemen risiko pada proses bisnis organisasi.
3. Kompetensi dan keterampilan pegawai terkait manajemen risiko di Inspektorat dan OPD perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan Diklat dan Bimbingan Teknis.
4. Upaya pencegahan korupsi yang diamanahkan dalam MCP perlu ditingkatkan.
5. APIP telah dalam *self assessment* kapabilitas APIP secara berkala dalam menjaga dan mempertahankan level kapabilitas APIP, hanya diperlukan koordinasi secara berkelanjutan dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Belum meratanya kompetensi auditor khususnya Calon PNS pada

formasi auditor.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat banyak kendala dan hambatan dalam proses pencapaian target kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang sehingga ke depan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di antaranya sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan dengan OPD terkait secara terus menerus/ berkala.
2. Melakukan sosialisasi monitoring dan evaluasi pengendalian Risiko kepada seluruh OPD sebelum dilakukan identifikasi ulang atas penetapan daftar risiko kegiatan pokok dan Rencana Tindak Pengendalian secara berkelanjutan dan memadai sebagai proses penerapan manajemen risiko pada proses bisnis organisasi.
3. Mengalokasikan anggaran dan kegiatan peningkatan kompetensi dan keterampilan pegawai terkait manajemen risiko.
4. Melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam PKPT yang mendorong upaya pencegahan korupsi yang diukur melalui aplikasi MCP.
5. Melakukan *self assessment* kapabilitas APIP secara berkala dengan didukung dengan pemenuhan dokumen dan koordinasi secara berkelanjutan dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
6. Mengalokasikan kegiatan peningkatan kompetensi khususnya PNS formasi auditor dalam bentuk Bimtek/Diklat/Sosialisasi/PKS.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai panduan evaluasi atas tahun-tahun sebelumnya dan menjadi pedoman perbaikan untuk tahun kedepan sehingga seluruh target yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang dapat tercapai.

Jombang, 30 Januari 2024

INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG

ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., MSI.

Pembina Tk. I

NIP. 19670105 199212 1 001